

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Metode penelitian ini memanfaatkan pendekatan deskriptif, yang didasarkan pada filsafat positivisme. Pendekatan ini digunakan untuk meneliti populasi atau sampel secara acak dengan penggunaan instrumen penelitian untuk mengumpulkan data. Setelah mendapatkan data keuangan, dilakukan perhitungan-perhitungan untuk memecahkan masalah sesuai dengan tujuan penelitian. Analisis data dilakukan secara kuantitatif dengan tujuan menguji hipotesis yang telah diajukan.¹

Pendekatan deskriptif diterapkan dalam penelitian ini untuk mengatasi masalah yang timbul saat ini. Pendekatan ini melibatkan pengumpulan, pengklasifikasi, analisis data, serta penyimpulan berdasarkan hasil analisis. Laporan hasil penelitian menciptakan gambaran tentang situasi yang ada. Metode survei digunakan untuk mengumpulkan data primer secara langsung dari sumber data pertama dalam penelitian, dengan mengandalkan metode dokumentasi.²

B. Populasi dan Sampel

Populasi menurut Ismiyanto merupakan keseluruhan subjek atau totalitas subjek penelitian yang dapat berupa orang, benda atau suatu hal yang di dalamnya dapat menghasilkan data informasi (data) penelitian.³ Populasi yang digunakan pada penelitian ini adalah pengumpulan data keuangan APBDes seluruh Kecamatan Undaan Tahun Anggaran 2019-2022. Sampel merupakan bagian dari populasi, dimana sampel harus bisa menggambarkan seluruh karakteristik yang ada pada populasinya.⁴ Teknik pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah pengambilan sampel acak berdasarkan area atau wilayah.

¹ Sandu siyono, *Dasar Metodologi Penelitian* (Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015).

² Ajar Rukajat, *Pendekatan Penelitian Kuantitatif* (Yogyakarta: CV Budi Utama, 2018).

³ Edi Roflin, *Populasi, Sampel Variabel Dalam Penelitian Kedokteran* (Pekalongan: PT Nasya Expanding Manajemen, 2021).

⁴ Roflin.

C. Definisi Operasional Variabel

Definisi operasional variabel adalah panduan yang menjelaskan cara mengukur suatu variabel dengan cara yang dapat diamati dan diukur.⁵

Definisi operasional variabel adalah penentuan batasan dan metode pengukuran variabel yang sedang diselidiki. Ini sangat penting karena definisi operasional membantu menentukan sampel yang sesuai untuk penelitian. Dengan definisi operasional, variabel dijelaskan secara terperinci dengan menggunakan perhitungan yang konkret dan menggunakan data nominal untuk memfasilitasi interpretasi data.⁶

Variabel sebagai tindakan objek yang diteliti dalam penelitian mengenai evaluasi kinerja keuangan desa tahun anggaran 2019-2022 adalah:

1. Pendapatan Daerah
Pendapatan daerah adalah total penerimaan yang berasal dari pendapatan asli daerah, alokasi dana perimbangan, dan sumber pendapatan sah lainnya.⁷
2. Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah hasil gabungan dari penerimaan pajak, termasuk pajak daerah dan retribusi daerah, serta penerimaan non-pajak seperti hasil dari perusahaan milik daerah, investasi, dan pengelolaan sumber daya alam.⁸
3. Dana Perimbangan
Pendanaan daerah diperoleh melalui APBN, termasuk dana bagi hasil, dana alokasi umum, dan dana alokasi khusus yang berasal dari pemerintah pusat. Dana bagi hasil ini diperoleh dari pajak dan sumber daya alam.⁹

⁵ Sumadi Surya Bata, *Metode Penelitian* (Jakarta: Raja Gafindo Persada, 2008).

⁶ Rafika Ulfa, "Variabel Dalam Penelitian Pendidikan," *Jurnal Pendidikan Dan Keislaman*, 2021, 342–51, <https://doi.org/10.32550/teknodik.v0i0.554>.

⁷ Abdul Halim, *Akutansi Keuangan Daerah* (Jakarta: Slemba 4, 2004).

⁸ Muhammad Safar Nasir, "Analisis Sumber-Sumber Pendapatan Asli Daerah Setelah Satu Dekadeotonomi Daerah," *Jurnal Dinamika Ekonomi Pembangunan* 2, no. 1 (2019): 30–45, <https://doi.org/10.14710/jdep.2.1.30-45>.

⁹ Irfan Ferdiansyah, Dwi Risma Deviyanti, and Salmah Pattisahusiwa, "Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, Dan Dana Perimbangan Terhadap Belanja Daerah," *Inovasi* 14, no. 1 (2018): 44–52, <https://doi.org/10.29264/jinv.v14i1.3546>.

4. Belanja

Belanja daerah mencakup semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah yang mengurangi dana lancar yang merupakan tanggung jawab daerah dalam satu tahun anggaran. Belanja daerah digunakan untuk mendanai pelaksanaan tugas-tugas pemerintah yang merupakan wewenang provinsi, kabupaten, atau kota, termasuk urusan wajib dan urusan pilihan yang telah diatur dalam perundang-undangan yang berlaku.¹⁰

5. Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi adalah proses peningkatan produksi dalam suatu ekonomi atau perubahan yang berkelanjutan dalam kondisi ekonomi suatu negara, yang tercermin dalam peningkatan pendapatan nasional dalam jangka waktu tertentu.¹¹

D. Teknik Pengumpulan Data

1. Studi pustaka merupakan metode pengumpulan data yang melibatkan penelitian mendalam terhadap buku, literatur, catatan, serta laporan yang relevan dengan masalah yang sedang diselidiki.

2. Wawancara

Metode pengumpulan data ini melibatkan interaksi langsung dengan individu yang memiliki pengetahuan atau informasi yang diperlukan untuk penelitian. Wawancara dilakukan dengan mengajukan pertanyaan secara lisan atau menggunakan daftar pertanyaan sebagai panduan. Hasil dari wawancara ini akan menjadi data dasar untuk penelitian ini:

- a. Sejarah dan profil Kecamatan Undaan.
- b. Visi dan misi Kecamatan Undaan.
- c. Tujuan dan sasaran serta indikator Kecamatan Undaan.
- d. Struktur dan bagan organisasi Kecamatan Undaan.

3. Dokumentasi

Metode dokumentasi adalah cara mengumpulkan data dengan mencari informasi dari berbagai sumber berupa data dan dokumen yang tersedia.

¹⁰ “Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah,” n.d.

¹¹ Siti Indayani and Budi Hartono, “Analisis Pengangguran Dan Pertumbuhan Ekonomi Sebagai Akibat Pandemi Covid-19,” *Jurnal Ekonomi & Manajemen Universitas Bina Sarana Informatika* 18, no. 2 (2020): 201–8, <https://ejournal.bsi.ac.id/ejurnal/index.php/perspektif/article/view/8581>.

E. Teknik Analisis Data

Dalam penelitian kuantitatif, teknik analisis data menggunakan statistik deskriptif, yaitu metode yang digunakan untuk menganalisis data dengan menggambarkan atau mendeskripsikan data yang telah dikumpulkan sebagaimana adanya. Tujuannya adalah memberikan gambaran detail tentang data tanpa mencoba membuat kesimpulan umum atau generalisasi.¹²

Analisis data adalah langkah-langkah sistematis dalam mencari dan mengorganisir data yang berasal dari wawancara, catatan, dan dokumentasi. Data yang telah dikumpulkan diolah dan dianalisis untuk disajikan dengan cara yang lebih sederhana, sehingga memudahkan pembacaan dan interpretasi.

Tahap-tahap yang dapat dilakukan dalam menganalisis data ini sebagai berikut:

1. Menghitung Rasio kemandirian, Rasio ketergantungan keuangan daerah, Rasio efektifitas, Share, Growth, Elastisitas, Indeks kemampuan keuangan dengan membuat tabel.
2. Mendeskripsikan data dari hasil perhitungan Rasio kemandirian, Rasio ketergantungan keuangan daerah, Rasio efektifitas, Share, Growth, Elastisitas, Indeks kemampuan keuangan atau dengan melihat grafiknya.

Adapun formulasi untuk rasio kemandirian, rasio ketergantungan keuangan daerah, rasio, dan rasio efektivitas yaitu sebagai berikut:

1. Rasio kemandirian

Kemandirian keuangan daerah mengacu pada kemampuan suatu daerah dalam membiayai belanja daerahnya menggunakan sumber daya internal, khususnya Pendapatan Asli Daerah atau PAD. Pentingnya meningkatkan rasio kemandirian daerah terletak pada kemampuan daerah tersebut dalam mengelola otonomi daerah. Semakin tinggi rasio kemandirian daerah, semakin rendah ketergantungan daerah pada bantuan eksternal, terutama dari pemerintah pusat dan provinsi. Rasio kemandirian juga mencerminkan sejauh mana masyarakat ikut berpartisipasi dalam membayar pajak dan retribusi daerah.¹³

¹² Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2017).

¹³ Elly Karmeli, Wahyu Haryadi, and Muslimin, "Analisis Kemandirian Daerah Dan Derajat Desentralisasi Fiskal Daerah Kabupaten Sumbawa," *Jurnal Ekonomi & Bisnis* 10, no. 1 (2022): 52–60, <https://doi.org/10.58406/jeb.v10i1.730>.

Kemandirian keuangan daerah merujuk pada kapabilitas suatu daerah dalam membiayai aktivitas pemerintahan dan memenuhi kebutuhan lokal tanpa bergantung terlalu banyak pada bantuan keuangan yang diberikan oleh pemerintah pusat.¹⁴ Kemandirian keuangan daerah tercermin dari seberapa besar Pendapatan Asli Daerah (PAD) dibandingkan dengan pendapatan yang diperoleh dari sumber lain, seperti bantuan dari pemerintah pusat atau pinjaman daerah.¹⁵

Rasio kemandirian keuangan daerah diukur dengan membandingkan pendapatan yang berasal dari Pendapatan Asli Daerah dengan jumlah pendapatan yang diterima melalui transfer. Formula yang digunakan adalah:¹⁶

$$\text{R. Kemandirian Daerah} = \frac{\text{Pendapatan Asli Daerah}}{\text{Pendapatan Transfer}} \times 100\%$$

Kriteria untuk menetapkan kemandirian keuangan daerah dapat dikategorikan sebagai berikut:

Prosentasi PAD terhadap dana perimbangan	kemandirian keuangan daerah
0, 00 – 10, 00	Sangat baik
10, 01 – 20, 00	Baik
20, 01 – 30, 00	Cukup
30, 01 – 40, 00	Sedang
40,01 – 50, 00	Kurang
>50	Sangat kurang

Sumber : Kepmendagri No.690.900.327 tahun 1996

¹⁴ Monica Vidia Putri Sefira and Gideon Setyo Budiwitjacksono, “Analisis PAD Dan Belanja Pegawai Terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah Di Provinsi Jawa Timur 2019-2020,” *JIMAT (Jurnal Ilmiah ...* 13, no. 03 (2022): 938–47,

<https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/S1ak/article/view/46304%0Ahttps://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/S1ak/article/download/46304/23223>.

¹⁵ Halim, *Manajemen Keuangan Daerah* (Yogyakarta: UPPAMPYKPN, 2004).

¹⁶ Konstantinus Pati Sanga and Wihelmina Maryetha Yulia Jaeng, “Analisis Kemandirian Keuangan Daerah Kabupaten Flores Timur,” *Journal on Education* 5, no. 2 (2023): 2721–28, <https://doi.org/10.31004/joe.v5i2.916>.

2. Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah

Tingkat ketergantungan keuangan daerah merupakan salah satu kemampuan yang dapat mengukur sejauhmana daerah mampu mengelola keuangannya dalam membiayai aktivitas pembangunan.¹⁷ Rasio ketergantungan keuangan daerah mengukur seberapa besar pendapatan yang diterima daerah melalui transfer dibandingkan dengan pendapatan daerah itu sendiri. Jika nilai rasio ketergantungan keuangan daerah tinggi, itu menandakan tingkat ketergantungan daerah terhadap bantuan dari pemerintah pusat juga tinggi.¹⁸

$$\text{RKKD} = \frac{\text{Pendapatan Transfer}}{\text{Total Pendapatan}} \times 100\%$$

Kriteria untuk menetapkan ketergantungan keuangan daerah dapat dilihat sebagai berikut:

Prosentasi PAD terhadap total penerimaan non subsidi	Ketergantungan keuangan daerah
0, 00 – 10, 00	Sangat rendah
10, 01 – 20,00	Rendah
20, 01 – 30 - 00	Sedang
30, 01 – 40, 00	Cukup
40, 01 – 50, 00	Tinggi
>50	Sangat tinggi

Sumber : Kepmendagri No.690.900.327 tahun 1996

3. Rasio Desentralisasi Fiskal

Derajat desentralisasi menggambarkan seberapa besar kemampuan keuangan daerah dalam membiayai kegiatannya yang diukur dengan membandingkan jumlah Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan Total Pendapatan Daerah (TPD).¹⁹

¹⁷ Andi Patiroi, “Analisis Kemampuan Pengelolaan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Bantaeng,” *Jurnal Economic Resources* 2, no. 2 (2018): 87–101.

¹⁸ Mahmudi, *Analisis Keuangan Pemerintah Daerah Edisi Ke 3* (Yogyakarta: UPP STIM YKPM, 2016).

¹⁹ Nizwan Zuhri, “Kinerja Keuangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Ditinjau Dari Derajat Kemandirian, Ketergantungan, Dan Desentralisasi Fiskal,” *Indonesian Treasury Review Jurnal Perbendaharaan Keuangan Negara Dan Kebijakan Publik* 5, no. 2 (2020): 143–49, <https://doi.org/10.33105/itrev.v5i2.213>.

$$\text{RDF} = \frac{\text{Pendapatan Asli Daerah}}{\text{Total Pendapatan Daerah}} \times 100\%$$

Untuk melihat derajat desentralisasi fiskal skala interval sebagai berikut:

Prosentasi PAD terhadap TPD	Tingkat Desentralisasi Fiskal
0,00 - 10,00	Sangat kurang
10,01 - 20,00	Kurang
20,01 - 30,00	Sedang
30,01 - 40,00	Cukup
40,01 - 50,00	Baik
>50	Sangat Baik

Sumber : Tim Litbang Depdagri-Fisipol UGM, 1991

4. Rasio Efektivitas

Efektivitas dapat diukur melalui perbandingan antara pencapaian tujuan dengan hasil yang diperoleh. Dalam konteks manajemen keuangan, tingkat efektivitas dapat dinilai dengan membandingkan pencapaian penerimaan yang sebenarnya dengan target yang ditetapkan.²⁰

Rasio ini mencerminkan kemampuan pemerintah daerah dalam mencapai penerimaan yang direncanakan jika dibandingkan dengan target Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang ditetapkan berdasarkan potensi ekonomi daerah. Efektivitas daerah diukur dengan rasio efektivitas minimal 100%. Semakin tinggi rasio ini, semakin baik kinerja daerah dalam mencapai targetnya.²¹

Realisasi Penerimaan PAD

$$\text{Rasio Efektifitas (RE)} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan PAD}}{\text{Target Penerimaan PAD}} \times 100\%$$

Adapun kriteria untuk menetapkan Efektivitas pengelolaan keuangan daerah sebagai berikut:

²⁰ Pakei and Beni, *Konsep Dan Analisis (Evektifitas Pengelolaan Keuangan Daerah Diera Otonomi Daerah)* (Jayapura: Taushia, 2016).

²¹ Hery Susanto, "Analisis Rasio Keuangan Untuk Mengukur Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kota Mataram," *Distribusi - Journal of Management and Business* 7, no. 1 (2019): 81–92, <https://doi.org/10.29303/distribusi.v7i1.67>.

Presentasi kinerja keuangan	Kriteria
Diatas 100%	Sangat efektif
90% - 100%	Efektif
80% - 90%	Cukup Eektif
60% - 80%	Kurang Efektif
Dibawah 60%	Tidak Efektif

Sumber : Kepmendagri No.690.900.327 tahun 1996

Kemampuan keuangan daerah diukur dengan menghitung rata-rata dari indeks share, growth, dan elastisitas. Rumus untuk masing-masing indeks tersebut digunakan dalam perhitungan ini.

1. *Share*

Indeks share menggambarkan perbandingan antara Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan total Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung. Indeks ini mengukur sejauh mana kemampuan keuangan daerah dalam mendukung kegiatan Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung. Rasio ini memberikan gambaran tentang kapasitas keuangan daerah dalam membiayai kegiatan tersebut.²² Dengan rumus sebagai berikut:

$$\text{Share} = \frac{\text{PAD}}{\text{Total Belanja}} \times 100\%$$

Indeks share

$$\text{Index Share} = \frac{\text{Nilai Share Hasil Perhitungan} - \text{Nilai Share Minimum}}{\text{Nilai Share Maximum} - \text{Nilai Share Minimum}} \times 100\%$$

2. *Growth*

Growth adalah nilai persentase pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari satu tahun ke tahun berikutnya.²³ Growth mengukur sejauh mana kemampuan pemerintah daerah dalam menjaga dan meningkatkan pencapaian Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari satu periode ke periode berikutnya, dengan rumus:

$$\text{Growth} = \frac{\text{PAD}_i}{\text{PAD}_{i-1}} \times 100\%$$

²² Hery Susanto, “Analisis Kemampuan Keuangan Daerah Pemerintah Propinsi Nusa Tenggara Barat,” *Jurnal Organisasi Dan Manajemen* 10, no. 1 (2014): 15–26, <https://doi.org/10.33830/jom.v10i1.108.2014>.

²³ Soeharjoto, “Financial Capability and Performance of the Province of Kalimantan,” *Akuntabel* 15, no. 2 (2018): 131–38.

$$\text{Indek Growth} = \frac{\text{Nilai growth hasil pengukuran-nilai grot minimum}}{\text{Nilai growth maxsimium-nilai growth minimum}} \times 100\%$$

3. Elastisitas

Elastisitas adalah perbandingan antara pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Rasio ini digunakan untuk menilai sensitivitas atau elastisitas Pendapatan Asli Daerah terhadap perkembangan ekonomi suatu daerah.²⁴ Dengan rumus sebagai berikut:

$$\text{Elastisitas} = \frac{\text{Growth}}{\text{Pertumbuhan Ekonomi}} \times 100\%$$

Indeks Elastisitas

$$\text{Index Elastisitas} = \frac{\text{Nilai elastisitas hasil pengukuran} - \text{Nilai elastisitas Minimum}}{\text{Nilai elastisitas Maximum} - \text{Nilai elastisitas Minimum}} \times 100\%$$

4. Indeks Kemampuan Keuangan (IKK)

Metode Indeks Kemampuan Keuangan adalah hasil rata-rata dari perhitungan Indeks Pertumbuhan (Growth), Indeks Elastisitas, dan Indeks Share.²⁵ Dengan rumusan sebagai berikut:

$$IKK = (XG + XE + XS) / 3$$

Keterangan =

XG = Indeks Pertumbuhan

XE = Indeks Elastisitas

XS = Indeks Share

Indeks Kemampuan Keuangan Daerah (IKK) diklasifikasikan menjadi tiga kategori, yaitu tinggi, sedang, dan rendah, dengan nilai spesifikasi sebagai berikut:

²⁴ Stevany Hanalya Dethan, “Analisis Kemampuan Keuangan Daerah Pada Kabupaten/Kota Di Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun Anggaran 2009-2013,” *GaneÇ Swara* 9, no. 2 (2015): 145–51, <http://unmasmataram.ac.id/2015/09/05/25-stevany-2/>.

²⁵ Susanto, “Analisis Kemampuan Keuangan Daerah Pemerintah Propinsi Nusa Tenggara Barat.”

Indek Kemampuan Keuangan Daerah (IKK)	Klasifikasi
0,00 - 0,33	Rendah
0,34 - 0,43	Sedang
0,44 - 1,00	Tinggi

Sumber : Kepmendagri No.690.900.327 tahun 1996

